

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil BPRS

a. Sejarah Singkat Berdirinya BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi, maka kewenangan otonomi saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya. Serta untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut. Dimana pada gilirannya Lembaga Keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah secara merata.

Bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah Sumenep yang sangat ideal adalah Lembaga Keuangan Mikro, dalam hal ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).¹ Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan akuisisi bank

¹Arsip Company profile PT. BPRS Bhakti Sumekar.

Perkreditan Rakyat yang berdomisili di Sidoarjo yaitu PT. BPR DANA MERAPI untuk kemudian direlokasi ke Kabupaten Sumenep.

Untuk melakukan akuisisi terhadap PT. BPR Dana Merapi Pemkab. Sumenep membuat *Memorandum Of Understanding* (MOU) dan Surat Perjanjian Kerja Sama Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor 910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan PT Bank Syari'ah Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 27 Desember 2001. Dalam MOU tersebut pihak PT. Bank Muamalat sebagai pelaksanaan dalam proses pengambilalihan BPR serta bertanggung jawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan, rekrutmen, pelatihan dan pembinaan.

Gambar 4.1
Kantor Pusat BPRS Bhakti Sumekar Sumenep



b. Jejak Langkah BPRS Bhakti Sumekar

Tabel 4.1
Jejak Langkah BPRS Bhakti Sumekar²

N0	Tahun	Jejak Langkah
1	1993	Didirikannya PT. BPR Dana Merapi
2	2001	Akuisisi PT. BPR Dana Merapi oleh Pemkab Sumenep yang berdomisili di Kab. Sidoarjo
3	2002	1. PT. BPR Dana Merapi berubah nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar dan direlokasikan ke Kab. Sumenep 2. Pembukaan Kantor Kas Pasar Anom
4	2003	1. PT. BPR Bhakti Sumekar di konversi menjadi Bank Syariah dan menjadi PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar 2. Pembukaan Kantor Kas Lenteng
5	2004	1. Dikeluarkan ijin Operasional PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar 2. Pembukaan Kantor Kas Bangkal
6	2006	1. Peresmian Gedung Baru PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar yang beralamatkan di jalan. Trunojoyo 137 Sumenep 2. Pembukaan Kantor Kas Bluto 3. Pembukaan Kantor Cabang Pamekasan 4. Pembukaan Kantor Kas Ambunten
7	2010	Pembukaan 2 kantor yang terdiri dari:

²Laporan Tahunan 2016 BPRS Bhakti Sumekar, hlm. 13.

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Kas Guluk-Guluk 2. Kantor Kas Dungkek
8	2011	Pembukaan Kantor Kas Pasongsongan
9	2012	Pembukaan 3 kantor yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Kas Pragaan 2. Kantor Kas Kalianget 3. Kantor Kas Sapeken
10	2013	Pembukaan 3 kantor yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Kas Legung 2. Kantor Kas Bandaran 3. Kantor Kas Waru
11	2015	Peningkatan 4 kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pratama yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Cabang Pragaan 2. Kantor Cabang Sapeken 3. Kantor Cabang Dungkek 4. Kantor Cabang Ambunten
12	2016	Peningkatan 8 kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pratama yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Cabang Lenteng 2. Kantor Cabang Bluto 3. Kantor Cabang Guluk-Guluk 4. Kantor Cabang Pasongsongan 5. Kantor Cabang Kalianget 6. Kantor Cabang Legung 7. Kantor Cabang Waru

		<p>8. Kantor Cabang Bandaran</p> <p>Pembukaan 8 Kantor Baru yang Terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Cabang Masalembu 2. Kantor Cabang Manding 3. Kantor Cabang Dasuk 4. Kantor Kas Ganding 5. Kantor Cabang Rubaru 6. Kantor Cabang Gapura 7. Kantor Cabang Saronggi 8. Kantor Cabang Batu Putih
--	--	--

c. Identitas BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

- 1) Nama : PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar
- 2) Alamat : Jln. Trunojoyo No. 137 Sumenep
- 3) Telepon : 0328 – 672388
- 4) Fax : 0328 – 665638
- 5) Website : www.bhaktisumekar.co.id
- 6) Email : Info@bhaktisumekar.co.id
- 7) Media Sosial : facebook : BPRS.BS
- 8) Twitter : @BhaktiSumekar

d. Makna Logo BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Gambar 4.2
Logo Perusahaan



Logo BPRS Bhakti Sumekar menyerupai bunga merekah yang mencerminkan kegigihan, keleluasan, semangat, dan keramahan dalam semua aspek bisnis di lingkungan masyarakat yang diharapkan terus merekah dan berkembang. Sedangkan makna logo BPRS Bhakti Sumekar dari segi warna adalah:

- 1) Warna hijau: melambangkan kesuburan, kesejukan, dan kemakmuran, selain itu warna hijau juga identik dengan sesuatu yang bersifat islami
- 2) Warna kuning: melambangkan kesejahteraan, kejayaan dan kekayaan.³

Pada dasarnya PT. BPRS Bhakti Sumekar merupakan konversi dari PT. Dana Merapi, PT. BPR Dana Merapi didirikan berdasarkan akta notaris Yanita Poerbo SH No 64 tanggal 30 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan nomor C2-392.HT.01.01.TH 1993 tanggal 22 Januari 1993, serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomor 41/30/PT-1993 tanggal 6 Pebruari 1993.

Rencana akuisisi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

³Ibid, hlm. 14

Kabupaten Sumenep tanggal 19 Nopember 2001 dengan nomor 910/953/435.040/2001 dan telah disetujui pula oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Pebruari 2002 dengan Surat Persetujuan Nomor 4/5/DPBPR/P3BPR/Sb.

Dalam perkembangannya PT. BPR Dana Merapi telah mengalami perubahan nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar dengan Akte Nomor 24 tanggal 16 September 2002 oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH notaris di Sidoarjo dan Persetujuan dari Bank Indonesia no. 04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 Nopember 2003. Dan mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No. C-19351 NT.01.04 tahun 2002 tanggal 08 Oktober 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.⁴

e. Visi-Misi, Motto, dan Budaya Perusahaan “BHAKTI” BPRS

1) Visi

“Terwujudnya Masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya”.

2) Misi :

- a) Intermediasi antara pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasarkan syariah.
- b) Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah.
- c) Mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah.

⁴Ibid, hlm. 15

3) **Motto :**

“Mitra Bermuamalah Dengan Syariah”.

4) **Budaya Perusahaan “BHAkti”**

a) **Berkembang**

Dengan etos kerja yang kuat serta memiliki ide kreatif yang tinggi dan pengembangan ke masa yang akan datang, mengantisipasi tantangan dan kesempatan untuk berkembang melakukan inovasi-inovasi.

b) **Harmonis**

Rasa persaudaraan, rasa kebersamaan menjadi pedoman hidup. Menjadikan kenyamanan dan kekompakan dalam bermitra.

c) **Amanah**

Konsisten dan bertindak adil, bersikap tegas dengan rasa tanggung jawab yang besar dengan amanah nasabah.

d) **Kepuasan**

Memenuhi kebutuhan nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik, dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan, dengan dukungan SDM yang terampil, ramah, senang melayani dan didukung teknologi unggul.

e) **Transparan**

Saling terbuka demi membangun kepercayaan dan keyakinan dengan menjunjung tinggi pelayanan yang terbaik sehingga terbentuk suasana bersih dan berwibawa.

f) Integritas

Bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga nama baik, serta taat pada peraturan yang berlaku.⁵

f. Bentuk/Badan Hukum

PT. BPR DANA MERAPI didirikan berdasarkan akta notaris Yanita Poerbo SH No 64 tanggal 30 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan nomor C2-392.HT.01.01.TH 1993 tanggal 22 Januari 1993. Rencana akuisisi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep tanggal 19 Nopember 2001 dengan nomor 910/953/435.040/2001.⁶

Dan telah disetujui pula oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Pebruari 2002. Dalam perkembangannya PT. BPR Dana Merapi telah mengalami perubahan nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar dengan Akte Nomor 24 tanggal 16 September 2002 oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH dan Persetujuan dari Bank Indonesia nomor 04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 Nopember 2003. Pemerintah kabupaten Sumenep telah mengesahkan dalam sebuah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003 Tanggal 31-07-2003 tentang Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bhakti Sumekar.

Perubahan Sistem Konvensional menjadi Sistem Syari'ah dan perubahan nama PT.BPR Bhakti Sumekar menjadi PT.BPRS Bhakti Sumekar dalam akte notaris Sukarini SH notaris di Sidoarjo No.1 tanggal 1 Nopember 2003 telah

⁵Ibid, hlm. 19

⁶ <https://bhakti-sumekar.co.id/2015-05-07-19-03-11/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 04 April 2019

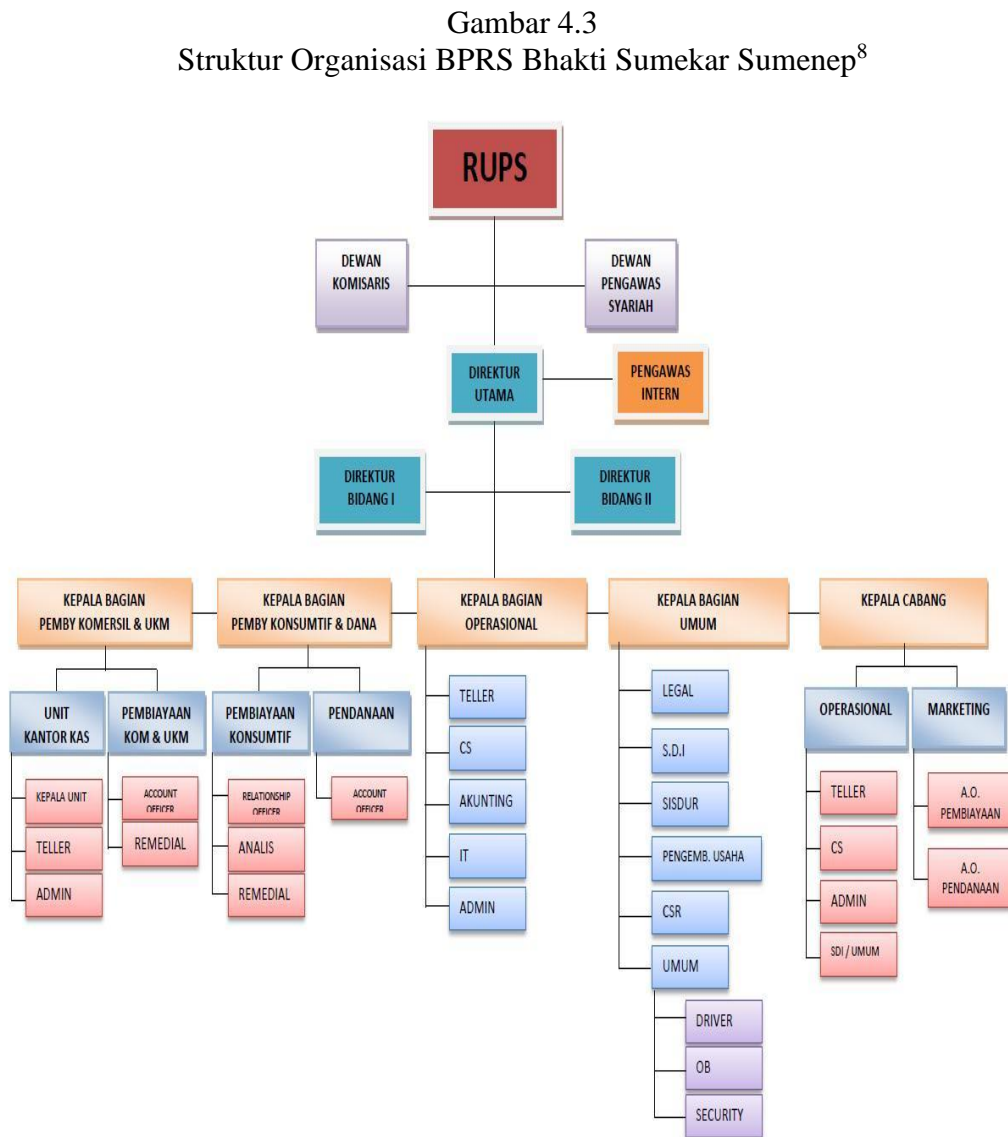
mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No.C-01389 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 Januari 2004 dan persetujuan izin prinsip Bank Indonesia NO.6/606/DPbs Jakarta tanggal 21 Mei 2004 serta Bank Indonesia Cabang Surabaya No.6/353/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 22 Juni 2004.

Dan Ijin Perubahan Kegiatan Usaha Konvensional Menjadi Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dari Gubernur Bank Indonesia No.6/74/KEP.GBI/2004 tanggal 22 September 2004 dan beroperasi secara prinsip syariah mulai 22 Oktober 2004.⁷

⁷ <https://bhakti-sumekar.co.id/2015-05-07-19-03-11/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 04 November 2019

g. Struktur Organisasi BPRS

1) Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep



a) Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. Hadi Soetarto, M.Si

Anggota Komisaris : Drs. H. Moh. Saleh, M.Si

Anggota Komisaris : KH. M. Taufiq Rahman FM

⁸<https://bhakti.sumekar.co.id/2015-05-07-19-03-11/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 31 Oktober 2019

b) Dewan Pengawas Syari'ah

DR. KH. Ahmad Muhammad Tdjani, MA

Arina Haqan, SHI. M.EI

c) Direksi

DirekturUtama : Novi Sujatmiko

DirekturBisnis : HairilFajar

DirekturOperasional : CahyaWiratama

2) Struktur Organisasi PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang**Madya Pamekasan Kab. Pamekasan**Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan⁹

Pimpinan Cabang	: Imam Baihaki
Kabag. Operasional	: Haerus Soleh
<i>Accounting</i>	: Nafisah
Admin Pembiayaan	: Ahadian Ramadhan
Admin <i>Rahn</i>	: Agung Tri Subiantoro
<i>Teller</i>	: Ayu Nur Jannah
	: Mufanani Angraeni
<i>Costomer Service</i>	: Hilwah
SID dan Pemberkasan	: Nur Rani Faradillah
AO/AAO Pembiayaan	: Moh. Rasul
	: Ari Kurniawan
	: Ra Basuki Rachmad
	: Abdul Kadir

⁹BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan

	: Moh. Nurul Kholiq
AO/AAO Pendanaan	: Lina Sari Fardania
AAO Remedial	: Putra Rizki Fauzi
Marketing <i>Rahn</i>	: Achmad Baidawi Aziz
<i>Security</i>	: Solehuddin
	: Taufiqurrahman
	: Dwi Agung Budi H.
<i>Office Boy</i>	: Syafril Hendriyanto
	: Mohammad Fandri
<i>Driver</i>	: Moh. Ali Sumarta

h. Jaringan Kantor BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Tabel 4.2
Jaringan Kantor BPRS Bhakti Sumekar Sumenep¹⁰

No	Jaringan Kantor	Alamat
1	Kantor Pusat	Jl. Trunojoyo No. 137 Sumenep Telp. (0328) 672388 Fax. (0328) 665638
2	Kantor Cabang Pratama Lenteng	Jl. Kalimas No 1A Lenteng Timur Sumenep Telp. (0328) 413479
3	Kantor Cabang Pratama Bluto	Jl. Raya Bluto No. 17 Bluto-Sumenep Telp. (0328) 415061

¹⁰Laporan Tahunan 2016 BPRS Bhakti Sumekar, hlm. 20-21.

4	Kantor Cabang Pratama Ambunten	Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 32 Ambunten-Sumenep Telp. (0328) 311955
5	Kantor Cabang Pratama Guluk-Guluk	Jl. Lembah Bukit Lancaran Sabajarin Guluk-Guluk- Sumenep Telp. (0328) 821293
6	Kantor Cabang Pratama Dungkek	Jl. Raya Pelabuhan No. 10 Dungkek- Sumenep
7	Kantor Cabang Pratama Pasongsongan	Jl. Abu Bakar Siddiq Pasongsongan-Sumenep Telp. (0328) 6770214
8	Kantor Cabang Pratama Pragaan	Jl. Raya Prenduan Pragaan-Sumenep Telp. (0328) 821204
9	Kantor Cabang Pratama Kalianget	Jl. Raya Pelabuhan Sapeken-Sumenep Telp. (0328) 6770021
10	Kantor Cabang Pratama Sapeken	Jl. Diponegoro Kampung Ra'as Sapeken-Sumenep Telp. (0328) 511023
11	Kantor Cabang Pratama Legung	Jl. Raya Legung Batang-Batang-Sumenep
12	Kantor Cabang Pratama Masalembu	Jl. Datuk Kaidani Desa Masalima Masalembu-Sumenep

13	Kantor Cabang Pratama Manding	Jl. Raya Manding, Manding Laok Manding-Sumenep
14	Kantor Cabang Pratama Dasuk	Jl. Raya Dasuk, Desa Nyapar Dasuk-Sumenep
15	Kantor Cabang Pratama Rubaru	Jl. Raya Rubaru, Desa Banasare Rubaru-Sumenep
16	Kantor Cabang Pratama Gapura	Jl. Raya Gapura Gapura-Sumenep
17	Kantor Cabang Pratama Saronggi	Jl. Raya Saronggi, Desa Tanah Merah Saronggi-Sumenep
18	Kantor Cabang Pratama Batu Putih	Jl. Raya Pasar Batu Putih, Desa Batu Putih Laok Batu Putih-Sumenep
19	Kantor Cabang Pratama Bandaran	Jl. Raya Bandaran, Desa Sumber Wangi Bandaran-Sumenep
20	Kantor Cabang Pratama Waru	Jl. Raya Tobalang Waru Pamekasan Telp. (0324) 511721
21	Kantor Cabang Madya Pamekasan	Jl. Mesigit No. 33 Pamekasan Telp. (0324) 336193 Fax. (0324) 336194
22	Kantor Kas Pasar Anom	Jl. Trunojoyo No. 262 Sumenep Telp. (0328) 674650
23	Kantor Kas Bangkal	Jl. Raya Gapura No. 6A Sumenep

		Telp. (0328) 673099
24	Kantor Kas Ganding	Jl. Raya Ganding Ganding-Sumenep

i. *Standart Operating Procedur (SOP)*

Standart Operating Procedur (SOP) adalah suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Adapun tujuan dari *Standart Operating Procedur (SOP)* adalah :¹¹

- 1) Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.
- 2) Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi.
- 3) Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait.
- 4) Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.

Sedangkan fungsi dari *Standart Operating Procedur (SOP)* itu sendiri adalah :

- 1) Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.
- 2) Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
- 3) Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.

¹¹ Arsip Company Profil BPRS Bhakti Sumekar.

- 4) Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.

Adapun *Standart Operating Prosedur* (SOP) Bagian/Defisi BPRS Bhakti Sumekar adalah sebagai berikut :¹²

1) Dewan Pengawas

- a) Memberikan saran dan nasehat kepada Direksi.
- b) Mengawasi kegiatan operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- c) Mengkaji, menilai, dan memberikan opini terhadap kesesuaian antara pedoman operasional dan produk bank dengan fatwa DSN.
- d) Bertanggung jawab kepada RUPS.

2) Internal Audit

- a) Diangkat oleh Direksi serta mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris.
- b) Koordinasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan Direktur Utama.
- c) Memeriksa dan melaporkan hasil pengawasan *intern* atas posisi keuangan bank serta semua aktivitas hasil operasional bank.
- d) Mengadakan pemeriksaan secara berkala atau sesuai kebutuhan ke setiap bagian atau unit kerja untuk menghasilkan laporan hasil audit yang menyangkut kebenaran data-data keuangan dan data-data lainnya yang terkait dengan aktivitas bank.

¹² Ibid.

- e) Menjalankan proses audit internal bank secara menyeluruh dan berkelanjutan.
- f) Merumuskan dan memberikan masukan pemecahan masalah hasil temuan audit kepada masing-masing bagian atau unit kerja untuk menghasilkan suatu sistem pengawasan *intern* yang *akuntable* dan *responsible*.
- g) Mereview dan memastikan bahwa hasil temuan audit ditindak lanjuti oleh bagian atau unit kerja yang diaudit.
- h) Berkoordinasi dengan pihak-pihak lain terkait dalam mempersiapkan implementasi pemenuhan laporan hasil audit.
- i) Menjalankan tugas-tugas audit lainnya dalam upaya pencapaian target-target audit.
- j) Bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

3) KabagOperasional

- a) Merencanakan, mengarahkan, mengawasi serta mengevaluasi seluruh kegiatan operasional bank.
- b) Bertanggung jawab kepada Direktur Operasional.

4) KabagPemasaran

- a) Merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan, mengevaluasi dan mengawasi target *funding* dan *financing* serta penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- b) Bertanggung jawab kepada Direktur Pemasaran.

5) KabagUmum&Personalia

- a) Merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi kinerja dan pengembangan pegawai.
- b) Bekerja sama dengan bagian atau unit kerja lain melakukan analisa kebutuhan anggaran untuk pengadaan seluruh sarana dan prasarana bagi kelancaran operasional bank serta pemeliharannya.
- c) Merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan bidang umum baik internal maupun eksternal.
- d) Mengembangkan dan membina hubungan dengan *supplier* rekanan bank.
- e) Bertanggung jawab kepada Direktur Operasional.
- f) Lampiran Surat No. 435.800.00 B.939 OPS/BPRS-BS/XII/2012.

6) A.OPendanaan

- a) Melakukan promosi produk-produk pendanaan.
- b) Menjaga kualitas layanan prima.
- c) Menghimpun dana masyarakat, institusi dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.
- d) Membina dan menjaga kerja sama terhadap nasabah kelolaannya serta mengembangkan kerja sama dengan nasabah-nasabah potensial.
- e) Melakukan monitoring atas semua rekening aktif yang menjadi kelolaannya.
- f) Bertanggung jawab kepada Kabag Pemasaran.

7) A.O Pembiayaan

- a) Melakukan promosi produk-produk pembiayaan.
- b) Menjaga kualitas layanan prima.
- c) Mengelola nasabah pembiayaan Kantor Pusat :
 - (1) Mencari nasabah pembiayaan potensial.
 - (2) Membuat *summary* dan rekomendasi atas nasabah yang akan dibiayai dan diserahkan kepada analis pembiayaan untuk dinilai kelayakannya.
 - (3) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah-nasabah kelolaannya.
 - (4) Bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian dana yang telah disalurkan.
 - (5) Memelihara berkas pembiayaan.
 - (6) Bertanggung jawab terhadap penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan tergolong Kurang Lancar.

8) Analisis Pembiayaan UMKM & Dana Komersial

- a) Melakukan kegiatan menilai seluruh aspek terkait dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh AO Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Kantor Kas guna memperoleh gambaran kelayakan kondisi nasabah yang akan dibiayai.
- b) Memberikan rekomendasi yang benar dan obyektif kepada komite pembiayaan.
- c) Bertanggung jawab kepada Kabag Pemasaran.

9) Petugas Gadai Emas

- a) Menerima permohonan pembiayaan dan melakukan kegiatan menilai seluruh aspek terkait dengan suatu permohonan pembiayaan dengan jaminan emas guna memperoleh gambaran kelayakan kondisi nasabah.
- b) Memberikan rekomendasi yang benar dan objektif kepada komite pembiayaan.
- c) Menata usahakan seluruh kegiatan pemberian pembiayaan dengan jaminan emas, meliputi:
 - (1) Bertanggung jawab menyiapkan dokumen perjanjian pembiayaan dan assesorisnya.
 - (2) Mencatat semua transaksi pembiayaan.
 - (3) Membebankan biaya-biaya terkait dengan persetujuan pembiayaan.
 - (4) Bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian dana yang telah disalurkan.
 - (5) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah-nasabah kelolaannya.
 - (6) Mengajukan lelang apabila nasabah wan prestasi.
- d) Bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kas atau Kabag Pemasaran.

10) A.O Penagihan & Remedial

- a) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan pembiayaan bermasalah kategori Diragukan dan Macet dan Hapus Buku (*write off*), yang kegiatannya terdiri atas:

- b) Penagihan, yaitu segala usaha untuk menarik kembali pembiayaan yang telah disalurkan.
- c) Penyelamatan dan Penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan apabila penagihan tidak dapat dipenuhi oleh nasabah, yang meliputi:
 - (1) Penyelamatan (*rescheduling, restrukturisasi, rekondisi*).
 - (2) Penyelesaian inovasi (pengalihan).
 - (3) Likuidasi Jaminan (Meminta nasabah untuk menjual sendiri, atau Bank melakukan penjualan dengan surat kuasa dari nasabah untuk menjualkan jaminan, atau Penjualan melalui BPUPLN).
- d) Bertanggung jawab kepada Kabag Pemasaran.

11) CS Pembiayaan/Analisis Pembiayaan Konsumtif

- a) Memberikan informasi kepada setiap nasabah yang membutuhkan keterangan tentang produk-produk dan syarat-syarat permohonan pembiayaan.
- b) Menerima permohonan pembiayaan konsumtif serta melakukan kegiatan menilai seluruh aspek terkait dengan permohonan pembiayaan guna memperoleh gambaran kelayakan kondisi nasabah.
- c) Memberikan rekomendasi yang benar dan objektif kepada komite pembiayaan.
- d) Mengarahkan permohonan pembiayaan non konsumtif kepada A.O. Pembiayaan.

e) Bertanggung jawab kepada Kabag Pemasaran.

12) CS Tabungan & Deposito

- a) Memberikan informasi produk pendanaan dan syarat-syarat pembukaan rekening tabungan / deposito.
- b) Membantu nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening tabungan / deposito.
- c) Menyiapkan buku tabungan / bilyet deposito.
- d) Menata usahakan seluruh berkas/data pembukaan rekening tabungan / deposito.
- e) Melakukan proses bagi hasil tabungan / deposito.
- f) Bertanggung jawab kepada Kabag Operasional.

13) Teller

- a) Mengatur dan bertanggung jawab atas posisi dana/kas.
- b) Memberikan pelayanan transaksi tunai (penyetoran dan pencairan).
- c) Bertanggung jawab kepada Kabag Operasional.

14) Legal

- a) Tugas dan Tanggung jawab unit kerja Legal meliputi:
 - (1) Pemeriksaan Dokumen, yaitu memeriksa kelengkapan legalitas data jaminan dan memeriksa legalitas data nasabah.
 - (2) Taksasi Jaminan, melakukan *survey* untuk mengecek kebenaran agunan dari sisi legalitas, dan melakukan taksasi nilai agunan pembiayaan.

- b) Membuat dan menyampaikan opini legal data jaminan dan data nasabah serta taksasi nilai jaminan kepada analis pembiayaan.
- c) Bertanggung jawab kepada Kabag Operasional.

15) Admin Pembiayaan

- a) Mengumpulkan informasi/data nasabah pembiayaan, melalui: Akses SID dari laman Bank Indonesia sehingga diperoleh informasi kolektibilitas pembiayaan nasabah dan verifikasi data nasabah pembiayaan (PNS) dari laman BAKN dan/atau BKD.
- b) Kegiatan Administrasi pembiayaan:
 - (1) Memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen yang terkait dengan pembiayaan, antara lain: syarat-syarat permohonan pembiayaan, dokumen agunan, dan data-data lainnya.
 - (2) Bertanggung jawab menyiapkan dokumen perjanjian pembiayaan dan assesorisnya.
 - (3) Mencatat atas semua transaksi pembiayaan dan/atau piutang.
 - (4) Bertanggung jawab menyiapkan berkas pembiayaan.
 - (5) Menghitung, mencatat, memblokir dan melakukan pembayaran atas biaya-biaya administrasi, asuransi, notaris dan biaya terkait lainnya.
 - (6) Menyiapkan pencairan pembiayaan.
 - (7) Membuat tagihan/angsuran setiap bulan.
 - (8) Mengamati posisi pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan melaporkan kepada *account officer* yang bertanggung jawab atas nasabah tersebut.

(9) Menata usahakan seluruh berkas data pembiayaan.

16) Akunting

- a) Mencatat dan mengkoordinasikan semua hasil kegiatan operasional bank.
- b) Memeriksa kelengkapan bukti-bukti transaksi pembukuan.
- c) Melakukan proses distribusi pendapatan bulanan dan menetapkan bagi hasil tabungan dan deposito.
- d) Menyusun laporan keuangan berkala dan laporan keuangan lainnya.
- e) Melakukan dan mencatat transaksi/transfer ke bank lain.
- f) Melakukan dan mencatat pembayaran kewajiban pajak.

17) Pengolahan Data Elektronik & IT

- a) Melakukan kegiatan pemrosesan data dari seluruh bagian/unit kerja dan pengintegrasian data tersebut menjadi suatu informasi berbasis Komputer yang dapat digunakan oleh manajemen untuk pengambilan suatu kebijakan dan berbagai fungsi manajemen lainnya.
- b) Membangun, memelihara dan mengembangkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- c) Memelihara dan mengembangkan hubungan dengan provider IT yang menjadi rekanan bank.

18) Asuransi

- a) Mengajukan penutupan asuransi pembiayaan kepada provider asuransi.
- b) Menata usahakan administrasi penutupan asuransi.

- c) Memindah bukukan premi asuransi kepada provider asuransi.
- d) Mengajukan klaim asuransi.

19) Pemberkasan

- a) Menata usahakan berkas pembiayaan.

20) Sistem dan prosedur

- a) Membuat dan mengembangkan sistem dan prosedur operasional bank.
- b) Menciptakan atau mengembangkan produk-produk bank.
- c) Mengikuti dan mereview perkembangan kebijakan operasional industri perbankan serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi.
- d) Bertanggung jawab kepada Kabag. Operasional.

21) Personalia

- a) Mengatur dan mengawasi semua aktivitas dan administrasi kepegawaian.
- b) Melaksanakan seleksi penerimaan pegawai baru sesuai kebutuhan dari masing-masing unit kerja.
- c) Mengatur penempatan dan pemindahan pegawai.
- d) Menyusun dan melaksanakan pelatihan dan pendidikan pegawai baik intern maupun bekerja sama dengan pihak lain.
- e) Mengurus perubahan status atau jabatan dan pemberhentian pegawai.

- f) Menyusun penghitungan gaji dan hal-hal lainnya yang terkait dengan gaji, seperti: jasa produksi, lembur, penggantian bantuan kesehatan, dll.
- g) Bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kualitas SDI.
- h) Memberikan informasi kepegawaian dan menampung keluhan-keluhan yang diajukan oleh pegawai dan mengusulkan jalan keluarnya.
- i) Membuat dan melakukan pembayaran pajak pegawai.
- j) Bertanggung jawab kepada Kabag Umum & Personalia.

22) Logistik & Umum

- a) Mengupayakan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor guna mendukung kelancaran operasional bank.
- b) Mengurus pembelian ATK serta peralatan dan perlengkapan kantor.
- c) Mengelola dan mengawasi pemakaian ATK, peralatan dan perlengkapan kantor.
- d) Mengelola dan mencatat pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya umum harian.
- e) Mengadministrasikan pelaksanaan penyusutan dan amortisasi sesuai dengan prosedur akuntansi.
- f) Membuat dan melakukan pembayaran pajak yang terkait dengan pembelian barang dan jasa.
- g) Mengasuransi harta benda milik bank.

- h) Menata usahakan berkas-berkas yang terkait dengan aspek legal bank, bukti kepemilikan harta bank dan berkas lainnya yang bersifat rahasia.
- i) Menata usahakan surat-surat masuk dan keluar baik internal maupun eksternal.
- j) Menjalankan kegiatan yang bersifat internal dan eksternal berkaitan dengan fungsi CSR bank.

j. SOP (*Standart Operating Procedur*) Produk BPRS Bhakti Sumekar

SOP produk-produk perbankan dan lembaga keuangan syariah yang ada di BPRS Bhakti Sumekar diantaranya:

1) Simpanan

a) Tabungan Barokah

Layanan tabungan untuk masyarakat umum sebagai persiapan masa depan dengan akad wadi'ah yad dhamanah (titipan).

(1) Keuntungan Bagi Nasabah

- (a) Hasilnya lebih besar
- (b) Bebas biaya administrasi
- (c) Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan

(2) Syarat dan Ketentuan:

- (a) Diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha
- (b) Mengisi formulir pembukaan tabungan barokah
- (c) Foto copy tanda pengenal: KTP, SIM, Paspor (untuk perorangan) dan foto copy Akta Pendirian beserta Anggaran Dasar dan perubahannya (untuk badan hukum)

- (d) Setoran awal minimal Rp. 10.000,- dengan saldo tabungan minimal Rp. 10.000,- dan dana dapat diambil sewaktu-waktu
- (e) Bisa diambil sewaktu-waktu
- (f) Bebas biaya administrasi.

b) Tabungan SIMPEL (Simpanan Pelajar)

Tabungan Simpel ini dikhususkan bagi pelajar mulai dari TK sampai SMA.

(1) Ketentuan SIMPEL:

- (a) Setoran awal mulai dari Rp. 1.000,-
- (b) Setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,-
- (c) Dana bisa diambil sewaktu-waktu
- (d) Sisa saldo tabungan minimal Rp. 1.000,-.

c) Tabungan Hari Raya (TAHARA)

Simpanan berencana yang diperuntukkan bagi anda yang ingin menyiapkan dana untuk Hari Raya Idul Fitri.

(1) Keuntungan TAHARA

- (a) Setoran awal mulai dari Rp. 100.000,-
- (b) Setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,- dan wajib dilakukan setiap bulan
- (c) Dana bisa diambil 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri
- (d) Sisa saldo tabungan minimal Rp. 10.000,-.

d) Tabungan Qurban

Layanan tabungan untuk masyarakat umum sebagai persiapan dana Qurban di Hari Raya Idul Adha dengan prinsip Mudharabah (bagi hasil).

e) Tabungan Haji Barokah

Tabungan haji barokah adalah tabungan yang membantu anda merencanakan ibadah haji menjadi lebih mudah.

f) Tabungan Umrah

Layanan tabungan untuk membantu masyarakat umum dalam merencanakan ibadah umrah dengan prinsip wadi'ah.

g) Deposito Mudharabah

Layanan simpanan berupa deposito berjangka untuk masyarakat umum yang ingin menginvestasikan dana sebagai persiapan masa depan dengan prinsip mudharabah mutlaqah (bagi hasil) sesuai dengan syariat islam.

2) Pembiayaan

a) Pembiayaan Al-Qardhul Hasan

Layanan pinjaman Kebajikan untuk usaha mikro tanpa menggunakan agunan serta tanpa beban margin atau bagi hasil.

b) Pembiayaan UMKM

Layanan pembiayaan modal kerja atau investasi untuk perorangan yang memiliki usaha kecil menengah dengan akad murabahah (jual beli) atau mudharabah atau musyarakah (bagi hasil).

(1) Keuntungan Bagi Nasabah

- (a) Kesepakatan margin tidak berubah selama periode pembiayaan
- (b) Pelunasan dipercepat tidak dikenakan penalty
- (c) Cicilan Ringan
- (d) Proses mudah dan cepat.

c) Pembiayaan Serbaguna

Layanan pembiayaan untuk PNS atau Karyawan Swasta yang berpenghasilan tetap dengan menggunakan akad murabahah (jual beli) untuk pembelian barang berbagai keperluan nasabah.

d) Pembiayaan Talangan Haji

Layanan Pembiayaan Talangan untuk Pendaftaran Haji membantu anda merencanakan ibadah haji menjadi lebih mudah.

e) Pembiayaan Talangan Umrah

Layanan Pembiayaan Talangan Umroh akan membantu anda mewujudkan impian untuk berangkat beribadah umrah.

(1) Manfaat

- (a) Mempermudah bagi masyarakat yang memiliki dana namun masih kurang cukup untuk melakukan ibadah umroh
- (b) Memberi peluang bagi masyarakat atau instansi.

f) Pembiayaan Sepeda Motor

Pembiayaan kepemilikan sepeda motor diajukan bagi semua kalangan, PNS, dan Swasta.

g) Pembiayaan Elektronik

Layanan pembiayaan bagi PNS, karyawan swasta atau institusi yang mengadakan kesepakatan perjanjian kerja sama untuk hal pembelian barang-barang Elektronik sehingga membantu anda dalam kehidupan sehari-hari.

h) Pembiayaan Pensiunan

Adalah pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk keperluan renovasi rumah, biaya pendidikan, modal kerja atau keperluan lainnya sesuai prinsip syariah.

i) Pembiayaan Sanitasi & Air Bersih (SADAR BERSIH)

Layanan pembiayaan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan sanitasi dan pengairan yang baik sehingga menjadikan keluarga yang sehat dengan menggunakan akad Murabahah (jual beli) dan bekerjasama dengan pihak *water.org*.

3) Gadai Emas

Layanan pembiayaan untuk segala keperluan bagi perorangan dengan menggunakan prinsip syariah (*Ar-Rahn*) yang berdasarkan perhitungan jasa penyimpanan dan pemeliharaan harian atas jaminan. Layanan yang **CEPAT**, **MUDAH**, dan **MURAH** untuk membantu memenuhi segala keperluan anda.

- a) Sistem Harian Rp. 3 per hari.
- b) Rp. 3 per hari per Rp. 10.000,- nilai taksiran jaminan, misalnya nilai taksiran jaminan Rp. 1.000.000,- maka nilai imbal jasa penyimpanan dan pemeliharaannya Rp. 300,- per hari.
- c) Persyaratan:
 - (1) Foto copy Kartu Identitas
 - (2) Jaminan berupa Emas.
- d) Jangka waktu 4 bulan bisa diperpanjang 1 kali.

k. Penghargaan Yang Diperoleh BPRS Bhakti Sumekar

Tabel 4.3

Penghargaan Yang Diperoleh BPRS Bhakti Sumekar¹³

No	Tahun	Penghargaan
1	2012-2013	<p>1. Penghargaan <i>Infobank Sharina Finance Award</i> 2012 dengan predikat sangat bagus atas kinerja keuangan 2011 pada tanggal 04 Oktober 2012.</p> <p>2. Peringkat kedua <i>The Best Islamic Rural Bank</i> dalam <i>Islamic Finance Award</i> oleh Karim <i>Business Consulting</i> pada tanggal 22 Februari 2013.</p> <p>3. Penghargaan <i>Infobank Sharia Finance Award</i> 2013 dengan predikat sangat bagus atas kinerja keuangan 2012 pada tanggal 06 November 2013.</p>
2	2014	<p>1. Peringkat Pertama <i>The Most Profitable Islamic Rural Bank Asets \geq IDR 100 Bn</i> dalam <i>Islamic Finance Award</i> oleh Karim <i>Business Consulting</i> pada tanggal 24 Februari 2014.</p> <p>2. Peringkat Pertama <i>The Most Profitable Islamic Rural Bank Java Region</i> dalam <i>Islamic Finance Award</i> oleh Karim <i>Business Consulting</i> pada tanggal 24 Februari 2014.</p>

¹³Laporan Tahunan 2016 BPRS Bhakti Sumekar, hlm. 36-38.

		<p>3. Peringkat Pertama <i>The Best Profitable Islamic Rural Bank Asets \geq IDR 100 Bn</i> dalam <i>Islamic Finance Award</i> oleh <i>Karim Business Consulting</i> pada tanggal 24 Februari 2014.</p> <p>4. Peringkat Pertama <i>The Best Profitable Islamic Rural Bank Java Region</i> dalam <i>Islamic Finance Award</i> oleh <i>Karim Business Consulting</i> pada tanggal 24 Februari 2014.</p> <p>5. Penghargaan <i>InfobankSharia Finance Award</i> 2014 dengan predikat sangat bagus atas kinerja keuangan 2013 pada tanggal 30 September 2014.</p> <p>6. Peringkat Pertama <i>BUMD Leader Dalam Madura Award</i> 2014.</p>
3	2015	<p>1. Penghargaan <i>InfobankSharia Finance Award</i> 2015 dengan predikat sangat bagus atas kinerja keuangan 2014 pada tanggal 16 Oktober 2015</p> <p>2. Peringkat Pertama <i>BUMD Leader Dalam Madura Award</i> 2015.</p>
4	2016	<p>1. Penghargaan <i>InfobankSharia Finance Award</i> 2016 dengan predikat sangat bagus atas kinerja keuangan 2015 pada tanggal 30</p>

		<p>September 2016.</p> <p>2. Penghargaan BUMD Terbaik Se-Madura Dalam <i>Madura Award</i> 2016.</p> <p>3. Penghargaan <i>Golden Award</i> 2011-2015 Atas Kinerja Keuangan Selama 5 tahun berturut-turut dengan predikat sangat bagus oleh <i>InfobankSharia Finance Award</i> 2016 pada tanggal 30 September 2016.</p>
--	--	--

2. Data Lapangan

Paparan data merupakan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan.

a. Paparan Data Dari Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan

Objek : IMAM BAIHAKI

Jabatan :Pimpinan Cabang BPRS

1. Bagaimana Prosedur Pembiayaan Modal Kerja Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan ?

“Layaknya koperasi syariah lainnya bak, BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan ikut mengupayakan program pengembangan Pengusaha Kecil melalui penyaluran pembiayaan Modal Kerja, mayoritas Masyarakat yang mengajukan pembiayaan Modal Kerja, mempunyai mata pencarian dengan membuka usaha ataupun berdagang. Akan tetapi pada Tahun 2016-2019 jumlah realisasi pembiayaan dan juga jumlah anggota Pengusaha kecil tidak mengalami peningkatan seperti di BPRS lainnya pada umumnya, eemmm khususnya di BPRS kami pada pembiayaan Modal Kerja ini mengalami jumlah penurunan. Ini karena calon anggota

belum mengetahui betul tentang perbankan syariah, tetapi mbak, pihak BPRS memberi binaan dan kajian kepada seluruh anggota yang meminjam pembiayaan tersebut, bahkan kami ikut memasarkan produk-produk anggota yang hendak dijual, pada intinya BPRS ikut mengangkat perkembangan harta kaum dhuafa, guru ngaji agar keluarga mereka sejahtera dan mengalami peningkatan ekonomi. Karena ada sistem jempot bola dimana marketing BPRS Muamalat mendatangi anggota untuk pengansuran”.

“Alhamdulillah Mbak, untuk prospek Modal Kerja kedepan insya allah harapannya bagus, berdasarkan pembiayaan yang lalu dan juga berdasarkan database BPRS Pusat dalam penyalurannya akan lebih baik dan pada intinya prospeknya bagus. Harapan adanya pembiayaan Modal Kerja masyarakat dengan Ekonomi menengah kebawah bisa terlayani dengan kecukupan modal untuk usaha produktifnya. Akan tetapi anggota Modal Kerja buta dengan dunia perbankan sehingga terkendala di bagian modal, apalagi ditambah dengan tidak adanya lembaga yang mencukupi modal usahanya, maka dari itu BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan ini memberikan permodalan usahanya untuk menyambung kebutuhan keluarga”.

Hasil Wawancara Dengan Bagian Pengelolaan Pembiayaan Modal Kerja BPRS

Objek : Bapak Rasul

Jabatan : Bagian Marketing Dan Pembiayaan

“Langkah pertama calon anggota mencari informasi mengenai jenis produk BPRS yang akan digunakan atau dimanfaatkan, informasi mengenai masalah dapat ditanyakan langsung kepada Customer Service, setelah melakukan negosiasi langkah selanjutnya adalah melakukan survey yang akan dilakukan oleh bagian marketing. Setelah itu calon anggota akan mendapatkan rekomendasi dari bagian pembiayaan, keputusan tentang ditolak atau diterima pembiayaan akan diputuskan oleh komite pembiayaan, bila pembiayaan tersebut disetujui maka langkah selanjutnya adalah pengikatan akad atau transaksi dari BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan diwakili oleh bagian hukum dan investigasi sedangkan pencairan pembiayaan dilakukan oleh Teller”.

Syarat pengajuan pembiayaan Modal Kerja ini sama dengan pengajuan pembiayaan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan
- b. FC KTP suami istri sebanyak 3 Lembar
- c. FC KK 1 lembar
- d. Surat tagihan listrik terakhir (bila ada) dan
- e. Surat tagihan Air (bila ada)
- f. Pencairan dana paling lama yaitu 1 minggu.

2. Apakah Pihak BPRS Ikut Berperan Dalam Kegiatan Usaha Nasabahnya ?

“Selalu Mbak, Kami selalu memberi dampingan dan binaan pada anggota Pembiayaan Modal Kerja. Pendampingan dan binaan ini dilakukan oleh bagian marketing, sehingga selain memberikan penawaran juga melakukan pendampingan usaha bagi Pengusaha kecil. Pendampingan usaha dilakukan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan Modal Kerja pada pedagang dengan memberi arahan dalam pencatatan sistem manajemen keuangan yang baik sehingga prospek kedepannya lebih baik”.

“Rata-rata pembiayaan yang diberikan oleh BPRS kepada pengusaha kecil dari periode 2016-2019 ini minimal Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp15.000.000,00. Anggota yang menjadi mitra BPRS dalam pembiayaan ini ada berbagai macam usaha yaitu pengusaha warung Makan, Pertokoan, dan Pedagang Kaki lima”.

3. Apa Tujuan Dari Pembiayaan Modal Kerja Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan ?

“Tujuan dari pengajuan pembiayaan ini bak, berbeda-beda, walaupun dana yang kami sediakan ditunjukan untuk pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) tidak sedikit pula yang melakukan peminjaman atas nama pengembangan usaha yang walau pada kenyataannya untuk kepentingan konsumsi bukan usaha, oleh sebab itu adanya *survey* usaha dan syarat-syarat yang telah pimpinan sebutkan di atas merupakan langkah pencegahan dalam alokasi dana modal kerja agar tepat sasaran, sehingga tidak hanya dapat membantu pengembangan usaha daerah akan tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan daerah dari pajak dan lainnya juga bisa membantu meningkatkan pendapatan perkapita atau perorangan.”

“Kalau secara teori tujuan pembiayaan itu sendiri bak ada beberapa :

- 1) Meningkatkan daya guna uang: Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas.
- 2) Meningkatkan daya guna barang: Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
- 3) Meningkatkan peredaran uang: Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha: Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitas.
- 5) Stabilitas ekonomi”

4. Adakah Kriteria Khusus Dalam Pembiayaan Modal Kerja Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan ?

“Kalau ditanya kriteria khusus sepertinya pasti ada bak, karena kita disini adalah koperasi atau bank syariah yang mana semua ketentuan baik hasil atau suku bunga harus sesuai syariah dan *procedural* yang ada wajib di laksanakan seperti kelengkapan berkas, adanya usaha dan yang terpenting bebas dari BI (Bank Indonesia). Maksudnya bebas di sini bak tidak bermasalah dengan BI Baik di bank konvensional ataupun bank syariah”.

Hasil Wawancara Dengan Anggota Pembiayaan Modal Kerja

Objek 1 : Bapak Gatot/ Pemilik Toko ATK (Nama Samaran)

1. Apakah Saat Ini Anda Sedang Menerima Pembiayaan Dari BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan?

“Ya Mbak, saya ini menerima pembiayaan Modal Kerja dari BPRS, istilahnya saya mendapatkan suntikan dana dari BPRS itu, selain itu saya juga di buat Benner untuk mempromosikan Toko Saya.”

2. Bagaimana Pendapat Anda Tentang Manfaat Dari Pembiayaan Modal Kerja Yang Diberikan Oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan ?

“Sangat membantu. Karena dengan pembiayaan dari BPRS, saya bisa menambah modal untuk beli alat-alat dan melengkapi isi toko saya. Dan hasilnya Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya sehari-hari.”

3. Apakah Terjadi Peningkatan Omset Usaha Setelah Mendapatkan Pembiayaan Dari BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan ?

“Terjadi peningkatan, seperti yang saya katakan diatas Mbak , ada binaan juga setiap bulannya jadi saya sekeluarga berterimakasih sekali pada pihak BPRS yang sudah membantu untuk mensejahterakan keluarga saya bahkan saya juga memiliki tabungan sekarang bak. Tidak hanya disitu saya juga tidak usah repot-repot masalah setoran karena bisa langsung dipotong atau di ambil dari simpanan yang ada jika saya tidak sempat ke BPRS bak.”

Objek 2 : Ibu Kimi Hime / Pemilik Warteg (Nama Samaran)

1. Apakah Saat Ini Anda Sedang Menerima Pembiayaan Dari BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan?

“ Saya sudah lebih dari 1 tahun bak meminjam modal ke BPRS dari masih usaha saya kaki lima sampai sekarang yang Alhamdulillah sudah punya tempat untuk berjualan bak, yang mana awal mula saya meminjam lantaran saya ingin menyewa tempat dan sekarang saya sudah bisa dan mengontrak tempat ini (Tempat usaha yang dikontrak) selama 5 tahun”

2. Bagaimana Pendapat Anda Tentang Manfaat Dari Pembiayaan Modal Kerja Yang Diberikan Oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan ?

“Alhamdulillah berkat dana yang saya dapatkan dari BPRS usaha saya semakin maju dan juga seperti yang saya katakana sebelumnya bak dari yang saya PKL menjadi punya tempat sehingga saya tidak perlu khawatir lagi dengan cuaca yang waktu masih jualan sebagai PKL saya terkendala dengan cuaca baik saat panas ataupun saat hujan, bahkan sekarang saya sudah bisa berjualan siang ataupun malam hari karena saya ada tempat sudah bak”

3. Apakah Terjadi Peningkatan Omset Usaha Setelah Mendapatkan Pembiayaan Dari BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan ?

“Kalau ditanya peningkatan yang jelas ada bak seperti yang saya katakana di awal dari yang awalnya saya PKL menjadi pemilik WARTEG, juga dapat mbak lihat sendiri saya sudah bisa dan memiliki pekerja untuk melancarkan usaha saya walau masih 2 orang bak tidak hanya itu bak saya kemarin ditawari lagi untuk pengembangan usaha saya jika saya mau karena kata pihak bank menu dan rasa dari masakan saya bisa dikatakan mantap, ini saya peroleh (Keahlian Memasak) saat saya dulu merantau ke ibu kota Jakarta sebagai pegawai restoran. Kalau masalah pendapatan gak usah mbak tanyakan yang jelas saya untung dan jika rugi usaha saya tidak mungkin bertahan sampai saat ini”

Objek 3 : Bapak Toni (Nama Samaran) / Pemilik Usaha Cuci Salju

1. Apakah Saat Ini Anda Sedang Menerima Pembiayaan Dari BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan?

“iya bak, saya sudah bekerja sama dengan BPRS hampir 5 tahun tepatnya sejak tahun 2015 yang lalu”

2. Bagaimana Pendapat Anda Tentang Manfaat Dari Pembiayaan Modal Kerja Yang Diberikan Oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan ?

“Untuk saya pribadi sangat bermanfaat bak. Walaupun masih ada kendala yang ada dalam prosesnya seperti yang saya rasakan bak. Padahal saya adalah nasabah lama bak akan tetapi saat saya mengajukan kredit lagi saya harus melengkapi berkas layaknya nasabah baru, selebihnya saya rasa baik”.

3. Apakah Terjadi Peningkatan Omset Usaha Setelah Mendapatkan Pembiayaan Dari BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan ?

“jelas bak, tidak hanya omset yang meningkat dalam hidup saya akan tetapi usaha sayapun juga bak, maklum saya sudah berkecimpung dalam bisnis ini lebih dari 3 tahun, dan saya sudah ada cabang baik di kota atau di pinggiran kota bak. Dan rencannya saya kesini ingin menanyakan produk yang cocok untuk saya ambil bak sebab saya berencana membuka cabang dan memperluas usaha saya tidak cukup di pamekasan jika memungkinkan sampai ke sumenep dan sampang sebagai langkah awalnya”.

Objek 4 : Bapak Liam (Nama Samaran) / Pemilik Warkop

1. Apakah Saat Ini Anda Sedang Menerima Pembiayaan Dari BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan?

“Masih belum bak, saya kesini mau Tanya produk untuk usaha WARKOP saya bak”

2. Bagaimana Pendapat Anda Tentang Manfaat Dari Pembiayaan Modal Kerja Yang Diberikan Oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan ?

“_”

3. Apakah Terjadi Peningkatan Omset Usaha Setelah Mendapatkan Pembiayaan Dari BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan ?

“_”

Objek 5 : Mas Boy (Nama Samaran) / Pengusaha Rental PS 3

1. Apakah Saat Ini Anda Sedang Menerima Pembiayaan Dari BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan?

“Iya bak, tepatnya saya menerima kredit sekitar 7 bulan yang lalu”

2. Bagaimana Pendapat Anda Tentang Manfaat Dari Pembiayaan Modal Kerja Yang Diberikan Oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan ?

“Saya rasa peran BPRS sangat baik, saya berkata demikian karena pihak marketing juga yang membantu saya mendapat tempat usaha ini alias yang mencarikan saya lokasi di dekat perkuliahan IAIN Madura ini. Tidak hanya itu bak, pihak marketing juga yang membantu saya meng ACC harga kontrak atau sewa rumah ini dengan nominal Rp 7.000.000,- yang awalnya pihak pemilik mematok harga sewa sebesar Rp 10.000.000,- dimana usaha saya yang sebelumnya bertempat di geraha kencana tepatnya didepan sekretariat HMI pamekasan”.

3. Apakah Terjadi Peningkatan Omset Usaha Setelah Mendapatkan Pembiayaan Dari BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan ?

“Alhamdulillah bak bukan meningkat lagi akan tetapi untung berlipat ganda, hal ini saya rasakan dan dapat Mbak lihat dari banyak anak yang bermain dan mengantri untuk menunggu giliran bermain atau sewa dari saking ramainya tempat saya ini bak. Juga dilihat dari unit yang ada saat masih di perumnas geraha dimana jumlah unit yang ada saat itu ada 7 unit dan dapat bak liat sendiri yang ada saat ini adalah 10 unit termasuk kelas VIV dan VVIV. Juga dari pendapatan yang jelas berbeda dimana saat di geraha omset yang saya dapat ± Rp 3.000.000,-/Bulan sudah dipotong perlengkapan dapur dibandingkan dengan yang sekarang bak omset yang saya terima ±Rp 10.000.000,-/Bulan dan itu bersihnya.” Papar mas boy.

Tabel 4.4
Justifikasi Bahwa BPRS Memiliki Pengaruh Yang Sangat Besar

No	Informan / Nasabah	Aspek Produksi (Jenis Usaha)	Aspek Distribusi (Pembeli)	Pendapatan Informan / Bulan
----	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

1	Bapak Gatot	Toko Alat Tulis Kantor	Anak Sekolah Mahasiswa Pekerja Kantoran	Rp.2.000.000- Rp.3.500.000
2	Ibu Kimi Hime	Warung Makan	Semua Kalangan Masyarakat	Rp.3.000.000- Rp.5.000.000
3	Bapak Toni	Jasa Pelayanan	Penyedia Jasa Cuci (Mobil dan Motor)	Rp.2.000.000- Rp.4.000.000
4	Mas Boy	Jasa Hiburan	Pelayanan Rental Play Station 3 Free WIFI	Rp. 7.000.000- Rp.10.000.000

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa usaha setiap nasabah mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Hal ini dapat kita lihat dari pendapatan dari masing-masing nasabah seperti yang ada pada tabel sehingga peran pembiayaan modal kerja dapat meningkatkan usaha dari setiap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bukan hanya isu melainkan benar adanya, dengan catatan pembiayaan modal kerja memang diperuntukkan untuk pengusaha atau pelaku usaha yang membutuhkan suntikan dana untuk mengembangkan usaha yang di miliknya.

b. Paparan Data Dari Observasi

Dari hasil observasi atau pengamatan peneliti melihat adanya lembaga keuangan yang sifatnya syariah ataupun tidak sangat di perlukan apalagi di era saat ini hal ini dikarenakan sektor usaha yang masih belum terjamah oleh masyarakat kalangan ekonomi kecil menengah kebawah kurang di *explor* sehingga perlu adanya permodalan untuk menggarap sektor usaha tersebut agar prospek.

Salah satu lembaga tersebut tidak lain adalah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan, dimana saat peneliti melakukan observasi atau penelitian menemukan bahwa nasabah sebelum melakukan peminjaman modal, nasabah tersebut bertanya akan produk yang ada di BPRS. Hal ini dikarenakan modal yang didapat dari pihak BPRS akan di realisasikan dalam bentuk usaha dimana usaha tersebut bertujuan untuk peningkatan ekonomi individu yang melakukan peminjaman. Pihak BPRS juga tidak sungkan dalam memberikan informasi terkait dengan produk yang ada pada lembaganya tersebut.

Setelah sesi bertukar informasi selesai peneliti melihat dan bahwa pihak BPRS memberikan saran akan produk yang akan di ambil oleh nasabah hal ini bertujuan agar pihak BPRS dan nasabah sama-sama lancar kedepannya. Juga pihak BPRS berkontribusi langsung dalam penyaluran dan penggunaan modal kerja yang didapat nasabah. Tujuannya tidak lain untuk meminimalisir penurunan devisa dari suatu usaha yang dijalankan nasabah. Salah satu contoh yang terjadi kepada Bapak Gatot beliau melakukan peminjaman modal ke BPRS untuk membeli alat dan melengkapi infrastruktur yang ada di toko yang dia miliki. Tidak hanya itu pihak BPRS juga ikut serta dalam upaya mempromosikan toko tersebut baik kepada nasabah lainnya atau masyarakat yang ada di sekitar lingkungan tempat Bapak Gatot tinggal dan usaha. Hal ini Karena bersifat *Simbiosis Mutualisme* dimana akan terjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara nasabah dan pihak BPRS.

B. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan pengumpulan data dan kemudian memaparkan sesuai dengan yang diperoleh dilapangan, sehingga

peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil temuan yang dilampirkan dalam bentuk tulisan sebagai berikut:

1. Pembiayaan modal kerja pada umumnya diperuntukkan untuk nasabah yang usahanya memerlukan tambahan biaya baik untuk infrastruktur usahanya ataupun dalam pengembangannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian modal untuk nasabah tidak hanya terpaku pada usaha yang prospek usahanya bagus melainkan diperuntukkan untuk nasabah yang akan memulai karir dalam bidang bisnis atau usaha. Karena dengan hal ini juga maka secara tidak langsung dapat mempengaruhi perekonomian daerah khususnya pamekasan.
2. Keunggulan BPRS Bhakti Sumekar dibandingkan bank-bank lain yaitu: banyaknya produk yang ditawarkan, bank tetap beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah islam, lebih adil, menggunakan falsafah dasar koperasi bank berbasis syariah, dan harga yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Mengenai prosedur pengajuan pembiayaan, menurut Marketing secara umum sangat mudah. Hanya saja ia mengingatkan usaha yang dapat dibiayai memang layak untuk diberi tambahan modal. Menurut Marketingnya kendala permodalan usaha kecil dan menengah selama ini adalah modalnya sering terpakai. Artinya antara keuangan usaha dan uang untuk keperluan sehari-hari tidak dipisahkan. Kejadian seperti ini sering melanda para pelaku usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, bagi pengusaha kecil harus belajar untuk memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Menurut Marketing, selama ini tak sedikit pelaku usaha kecil dan menengah yang malas berhubungan dengan

bank. Alasannya karena urusan dengan bank rumit dan berbelit-belit serta repot. Padahal, kata Marketing, berurusan dengan BPRS tidak seperti yang digambarkan banyak orang. Kalau memang serius ingin mendapatkan kucuran pembiayaan dari BPRS, maka yang harus dilakukan adalah menyiapkan dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan kredit ke BPRS antara lain :

- a. Foto Copy KTP Suami / Istri, KSK, Surat Nikah
 - b. Foto Copy SIUP atau Keterangan Usaha dari Kepala Desa
 - c. Jaminan Berupa BPKB atau Surat Tanah
 - d. Rencana penggunaan pembiayaan
 - e. Jangka waktu maksimal 24 bulan.
4. Lebih lanjut, tidak semua pengajuan pembiayaan harus disertai agunan. Pinjaman maksimal Rp 2 juta tidak perlu menyertakan jaminan. Menurutnya BPRS sudah banyak memberikan pembiayaan maksimal Rp 2 juta tersebut. “Tapi prioritas untuk orang-orang yang tinggalnya berdekatan dengan kantor BPRS. Bagaimanapun pihaknya harus meminta jaminan dari pihak yang ingin mendapatkan kredit lebih besar dari Rp 2 juta. Sebab uang untuk memberikan pembiayaan berasal dari nasabah yang menyimpan uangnya di BPRS. “Kalau pembiayaan tersebut macet nanti dinilai tidak amanah,” katanya. Jaminan tersebut jumlahnya setara dengan pinjaman pembiayaan yang didapat. Selain pembiayaan maksimal Rp 2 juta, ada pula pembiayaan tanpa agunan yaitu bila pembiayaan tersebut diajukan secara kolektif. Misalnya beberapa orang guru di sebuah sekolah berkelompok lalu mengajukan pembiayaan kepada BPRS. Namun jumlah maksimal pembiayaan yang didapat hanya Rp 10 juta. Jaminan

bisa berupa ijazah, bukan berupa aset. Usaha yang sudah berjalan setahun sudah dapat mendapatkan fasilitas pembiayaan tetapi tidak bisa menjadi agunan kredit. Pasalnya meskipun usaha tersebut kelihatan sehat tetap penuh ketidakpastian dan oleh karena itu tidak dapat menjadi agunan pembiayaan.

5. Segala jenis usaha, bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BPRS, sepanjang usaha tersebut legal dan tidak melanggar hukum. Jumlah pembiayaan yang didapat bisa sampai dengan Rp 200 juta dengan jangka pengembalian pembiayaan 1 tahun dan maksimal 3 tahun. Jenis-jenis pembiayaan yang bisa diperoleh dari BPRS secara umum adalah skema Murabahah atau yang disebut akad jual beli antara nasabah dengan BPRS. Skema pembiayaan seperti ini yang paling banyak diajukan oleh nasabah. Berikutnya adalah skema Ijarah atau akad perjanjian sewa menyewa. Dan terakhir adalah skema Musyarakah atau kongsi antara BPRS dengan pelaku usaha. Karena BPRS tidak mengenal bunga, maka yang terjadi adalah akad (kesepakatan) antara BPRS dan nasabah tentang nisbah bagi hasil. Persentase besaran nisbah tergantung kesepakatan akad.

C. Pembahasan

Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan

1. Pembiayaan Modal Kerja Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan.

Dalam dunia perbankan syariah sudah menjadi paradigma umum bahwa bank syariah memiliki hakekat dalam meningkatkan sektor riil melalui kegiatan bagi hasil di pendanaan maupun pembiayaannya, selain sebagai lembaga keuangan alternatif yang bebas bunga bagi masyarakat. Meski begitu terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan realita, dimana bukanlah pembiayaan bagi hasil yang mendominasi kegiatan di bank syariah, melainkan pembiayaan berbasis jual beli (murabahah). Oleh karena itu dilakukanlah penelitian ini untuk meneliti pembiayaan apa saja yang dilakukan bank syariah untuk meningkatkan sektor riil dan strategi-strateginya. Penelitian ini menggunakan model kualitatif dengan pendekatan *content analysis*. Data yang didapat sebagian besar bersumber dari wawancara dengan pihak bank syariah dan nasabah dan beberapa data dari dokumentasi. Dalam realitasnya pembiayaan yang paling banyak dikeluarkan oleh Bank BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan untuk membiayai kegiatan produktif adalah pembiayaan dengan akad jual beli (murabahah), akan tetapi yang akan peneliti bahas adalah pembiayaan modal kerja yang terdapat pada bank syariah tersebut namun tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat pembiayaan kegiatan produktif berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Strategi yang dilakukan meliputi penyuluhan dan pelatihan bagi para pembisnis UMKM serta pemberian *advice* atau penatausahaan bagi anggota

mitranya. Ke depannya apa yang dilakukan BPRS dapat lebih mencirikan apa yang menjadi hakekat dari bank syariah, yaitu sebagai pengembang sektor riil dan sebagai mitra dari nasabah. Begitu juga dengan strategi-strategi yang dilakukannya dapat mencakup sektor-sektor yang lebih luas lagi, seperti sektor pertanian dan perdagangan.

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh banksyariah. Seperti yang diketahui bahwa pembiayaan artinya adalah suatu kepercayaan. Artinya, Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Hal ini berarti bahwa dana yang diberikan kepada nasabah diyakini dapat dikembalikan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati bersama. Akan tetapi, sering kali terjadi *wanprestasi* (ketelambatan pembayaran atau angsuran yang masih bisa di toleransi) oleh nasabah kepada bank. PT. BPRS Bhakti Sumekar. Wanprestasi tersebut biasanya terjadi kepada produk-produk pembiayaan diantaranya pembiayaan talangan haji dan umroh, pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serba guna dan pembiayaan konsumtif. UMKM itu sendiri ada 3 macam yaitu modal usaha, modal kerja dan investasi.

Prioritas pembiayaan modal kerja yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan sebenarnya diperuntukkan kepada kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), akan tetapi pada prosesnya yang terjadi tidak seperti di lapangan, dimana total dana atau anggaran yang di peruntukkan untuk modal kerja atau usaha sebesar 50% dari total dana yang ada di BPRS

hanya sebagian yang terealisasikan sesuai dengan tujuannya atau $\pm 25\%$ dari dana yang di anggarkan. Hal ini terjadi karena fakta di lapangan yang berkata demikian. Hal ini juga yang membuat marketing dari pihak BPRS bekerja ekstra dalam rangka memberi informasi akan produk dan kemudahan yang ada di BPRS Bhakti Sumekar terutama dan sasaran utamanya adalah pelaku usaha, sehingga para pelaku usaha tersebut mendapatkan dana segar dalam upaya pengembangan usahanya, sehingga terjadi peningkatan perekonomian dan pendapatan individu yang berakibat pada peningkatan ekonomi daerah khususnya pamekasan.

Syarat pengajuan pembiayaan Modal Kerja ini sama dengan pengajuan pembiayaan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan
- b. FC KTP suami istri sebanyak 3 lembar (jika sudah berkeluarga)
- c. FC KK 1 lembar
- d. Surat tagihan listrik terakhir (bila ada) dan
- e. Surat tagihan Air (bila ada)
- f. Pencairan dana paling lama yaitu 1 minggu.
- g. Nasabah harus bebas dari BI (Bank Indonesia).

Setelah semua prosedur dan syarat-syarat terpenuhi baik dari pihak BPRS sebagai penyedia modal ataupun dari pihak nasabah yang melengkapi berkas-berkas untuk pengajuan pembiayaannya, maka marketing melakukan *survey* kepada usaha yang dimiliki nasabah dimana disini terdapat proses yakni *survey* tempat usaha, dokumentasi tempat usaha dan menilai kelayakan usaha beserta tempatnya. Setelah dari pihak marketing sudah di *scoring* dan dinyatakan layak maka berkas tersebut selanjutnya di ajukan ke bagian analisis untuk di acc. Baru

nasabah akan di berikan jangka waktu paling lama 7 hari guna pencairan pembiayaan modal beserta membawa jaminan yang akan menjadi jaminan untuk pengajuan modalnya baik berupa Sertifikat, BPKB, atau surat-surat penting lainnya.

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. Selain dari pada itu pembiayaan juga dapat diberikan oleh pihak lembaga keuangan. Sedangkan pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk modal kerja suatu perusahaan atau pelaku bisnis atau usaha dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku atau stok barang mentah, bahan pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal dan lain-lain.

Melihat dari tujuan dan fungsi dari pembiayaan modal kerja yang mana tujuan pembiayaan modal kerja secara makro dan mikro yaitu:

Tujuan yang bersifat makro, antara lain:

- a. Meningkatkan daya guna uang baik itu untuk keperluan produktifitas ataupun untuk peningkatan produksi.
- b. Meningkatkan daya guna barang, dengan adanya pembiayaan maka akan terjadinya perpindahan dari suatu barang yang mana dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

- c. Meningkatkan peredaran uang, dengan pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha akan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya.
- d. Guna stabilitas ekonomi.
- e. Dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Sehingga peran pembiayaan modal kerja dapat kita lihat dari beberapa tujuannya yaitu untuk hal meminimalkan kekurangan modal dagangan bahwa terkait jumlah produk yang ada pada setiap nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja usaha terjadi peningkatan dalam jumlah stok barang yang ada.
- f. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- g. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- h. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.
- i. Membuka lapangan kerja baru.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

- a. Memaksimalkan laba.
- b. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- c. Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

2. Peran Pembiayaan Modal Kerja Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan Dalam Meningkatkan UMKM Nasabahnya

Berdasarkan gambaran pembiayaan UMKM yang telah dijelaskan pada bagian pertama, maka peranan lembaga pembiayaan sebagai alternatif sumber pembiayaan sangat besar. Peranan ini telah dijalankan oleh sebagian besar lembaga pembiayaan terutama lembaga pembiayaan bank. Bukan hanya bank, tetapi koperasi juga mulai melakukan pembenahan manajemen guna memenuhi kebutuhan ini.

Adapun peran lembaga pembiayaan sebagai alternatif sumber pembiayaan dapat dilihat pada:

- 1) Sumber modal yang dimiliki UMKM, pada umumnya terdiri dari dua sumber yaitu modal sendiri dan pinjaman. Lembaga pembiayaan mampu mencukupi kekurangan modal yang diperlukan oleh UMKM dalam menjalankan usahanya. Lembaga pembiayaan dapat memberikan batas (plafon) pinjaman yang besar dengan tetap memperhatikan prinsip 5C. Bahkan untuk kasus tertentu, lembaga pembiayaan hanya memperhatikan prinsip 3C yaitu *Character*, *Capital* dan *Collateral*.
- 2) Kemudahan akses dan prosedur yang tidak berbelit-belit. Slogan waktu adalah uang sangat kental pada UMKM di sektor perdagangan yang penghasilannya berasal dari penjualan harian. Kemudahan akses yang ditawarkan dengan prosedur yang jelas telah membantu UMKM untuk mendapatkan tambahan modal yang diperlukan. Untuk beberapa kasus, UMKM tidak perlu mendatangi kantor lembaga pembiayaan karena terdapat sales yang menangani hal ini. Sedangkan untuk waktu pengurusan, beberapa lembaga pembiayaan

menetapkan maksimal 3 hari kerja dari berkas lengkap dana sudah dapat dicairkan.

- 3) Suku bunga atau sistem bagi hasil kompetitif. Suku bunga atau sistem bagi hasil yang tinggi merupakan hal yang ditakutkan oleh UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. Beberapa lembaga pembiayaan menawarkan suku bunga atau sistem bagi hasil yang kompetitif. Suku bunga atau sistem bagi hasil ini diharapkan tidak memberatkan UMKM dalam melakukan pembayaran. Untuk UMKM yang baru memulai usaha, tersedia kredit usaha rakyat yang menawarkan suku bunga yang rendah. Tetapi karena platform pinjaman.
- 4) Sistem pembayaran fleksibel inovasi. Sistem pembayaran juga merupakan peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM. Sistem *pick up* harian yang diterapkan bagi pedagang di pasar membawa keuntungan bagi kedua pihak. Bagi lembaga pembiayaan, sistem ini dapat menekan angka *Non Performing Loan* karena menjamin ketersediaan dana untuk membayar cicilan pada akhir bulan. Bagi UMKM, sistem penarikan harian meringankan cicilan pembayaran dan menghemat waktu dan tenaga untuk melakukan pembayaran.
- 5) Informasi mudah didapat. UMKM mudah mendapatkan informasi mengenai produk pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan bank ataupun lembaga pembiayaan non bank. Informasi yang paling banyak adalah dari sales dan teman atau keluarga. Kemudahan akses informasi dan fasilitasi untuk mendapatkan pinjaman menunjukkan peran lembaga pembiayaan telah dijalankan sebagai alternatif sumber pembiayaan. Meskipun peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM telah dijalankan, tetapi terdapat

kendala bagi sebagian UMKM untuk mendapatkan akses tersebut. Kendala yang utama adalah persyaratan agunan. Memang untuk beberapa program dari pemerintah, agunan tidak dipersyaratkan, tetapi plafon yang diberikan juga tidak terlalu besar. Jika UMKM menginginkan mendapatkan dana yang besar, maka UMKM harus menyediakan agunan sebagai jaminan pembayaran pinjaman. Jika UMKM membutuhkan dana yang besar tetapi tidak memiliki agunan, maka UMKM terpaksa mengambil produk kredit tanpa agunan atau meminjam kepada bank keliling. Hal ini menimbulkan konsekuensi UMKM harus membayar bunga yang lebih tinggi, yang akan menjadi masalah di kemudian hari.

Setelah pembiayaan dilakukan maka yang akan terjadi efek dari pembiayaan tersebut yang berupa kenaikan atau tidak dari suatu kegiatan usaha. Kemudian untuk memaksimalkan laba dengan adanya penambahan modal dan bertambahnya stok barang dagang sehingga pendapatan para pedagang pun meningkat. Seperti yang dialami dan dirasakan oleh setiap nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja usaha pada BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG MADYA PAMEKASAN dan menggunakan pembiayaan sebagaimana mestinya maka perubahan itu pun akan dirasakan. Sebab Peningkatan suatu penjualan UMK harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum kapasitas yang ada membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat dipenuhi dari sejumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan.

Selanjutnya kas dimaksud digunakan untuk membeli bahan baku sehingga proses produksi dapat berkesinambungan. Pengelolaan modal kerja diperuntukkan kepada unsur-unsur modal kerja yaitu alokasi kepada piutang dagang dan pembelanjaan persediaan barang. Pembiayaan modal kerja tersebut sangatlah berguna dan bermanfaat bagi pelaku usaha mikro yang sedang membutuhkan penambahan modal untuk meningkatkan usahanya guna memperoleh laba yang lebih besar dan berkesinambungan. Para pelaku usaha tidak hanya datang dari kalangan besar saja, namun juga datang dari golongan kecil seperti pedagang yang terdapat di pasar Kolpajung, 17 Agustus (Pasar Bere'), Pasar Ghurem dan Tapsiun di Pamekasan pada khususnya.

Dalam mengembangkan usahanya tersebut para pedagang harus memiliki bantuan ataupun dorongan modal yang cukup besar untuk mengelola dan mengembangkannya. Tetapi terkadang tidak semua pedagang kecil memiliki modal yang cukup, maka dari itu mayoritas dari mereka memberanikan meminjam uang kepada orang yang siap untuk memberikan modal kepada lembaga-lembaga keuangan ataupun keperseorangan (*rentenir*). Dalam hal ini pihak BPRS selaku lembaga keuangan mikro memberikan fasilitas yaitu pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja usaha untuk memenuhi kebutuhan pihak *defisit unit*. Sehingga berdasarkan hasil wawancara penulis dengan nasabah BPRS dalam kegiatan pembiayaan modal kerja terhadap usaha mikro kecil sedikit banyak mengalami peningkatan dalam pertumbuhan modal, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan pasar.

Hal ini juga terlihat dari adanya penambahan barang dagang dan perbaikan kios-kios dagang yang ada di pasar yang tersebut di atas. Juga peneliti

menemukan peningkatan jumlah orang yang berbelanja di pasar-pasar tersebut. Hal ini dikarenakan selain jumlah stok barang yang di jual bertambah juga dikarenakan pilihan juga sudah berfariasi atau beragam lantaran para pelaku pasar mendapatkan suntikan dana segar dari pihak BPRS. Otomatis pendapatan perkapita pelaku pasar ikut juga meningkat yang mana akan berdampak terhadap perekonomian perkapita dan perekonomian daerah khususnya pamekasan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan ekonomi sangat dibutuhkan, terutama dalam menyukseskan pengembangan kelompok Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal ini juga di perkuat dengan pernyataan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menyatakan sinergi dalam artian terlaksana program yang saling membantu dan menguntungkan, akan mempercepat terwujudnya pelaku usaha yang kreatif dan memiliki kemampuan memadai, di samping akan bisa membangun akses jaringan yang lebih luas. Hakikat dari pertumbuhan ekonomi, menurut dia, apabila jaringan usaha semakin luas, kemampuan atau sumber daya manusia (SDM) memadai, dan kemampuan melakukan inovasi produk usaha yang terus menerus atau berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal itu, akses jaringan harus diperluas, di samping penting pula untuk memahami kebutuhan pasar dan membuka akses pasar baru dengan mempertimbangkan kebutuhan di daerah lain, baik tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional atau global.

Di lembaga keuangan mikro, seperti koperasi, Pamekasan tergolong kabupaten yang lebih maju dibandingkan dengan tiga kabupaten lain di Pulau Madura. Pada sekitar April 2017, kabupaten berpenduduk sekitar 800 ribu jiwa lebih ini, telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai

kabupaten pertama yang menerapkan Koperasi Syariah. Bupati Pamekasan kala itu, Achmad Syafii, mengumumkan sudah ada 160 koperasi dari total 695 koperasi yang terdata di Dinas Koperasi dan UKM yang menerapkan pola syariah. "Pemerintah mendorong pengembangan koperasi syariah, untuk memanfaatkan potensi ekonomi di basis pondok pesantren, karena Pamekasan ini juga dikenal sebagai kota santri, di samping fokus program pembangunan kita pada Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam)," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan Djon Yulianto. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa pihak perbankan dimana hal ini adalah BPRS tidak hanya sebagai penyedia modal akan tetapi juga sebagai wadah bagi masyarakat khususnya pelaku usaha di pamekasan dalam mengembangkan usaha dan kewirausahaan guna mencapai kesejahteraan individu, kelompok dan masyarakat khususnya masyarakat pamekasan. Tidak hanya itu peran BPRS akan tetapi juga ikut serta dalam memantau dan menjaga stabilitas usaha dari setiap anggota nasabahnya, sehingga usaha yang dijalankan berdasarkan modal dari bank BPRS berjalan dengan lancar dan dampak dari itu akan terjadi peningkatan di sektor usaha baik usaha kecil menengah bahkan usaha yang skala besar.